

**PERANAN LAPORAN KEUANGAN DALAM AKUNTABILITAS  
KEUANGAN PADA DINAS TATA KOTA DAN  
TATA BANGUNAN KOTA MEDAN**



Oleh :

*ALIMUSA*

**NIM : 01 833 0132**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2005**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/22

JUDUL KRIPSI : PERANAN LAPORAN KEUANGAN DALAM AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN.

NAMA MAHASISWA : A L I M U S A.

NOMOR STAMBUK : 01 833 0132.

JURUSAN : AKUNTANSI

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing – I

Pembimbing – II



Drs. Rasdianto MS, Ak

Drs. Hj. Rosmaini Ak.

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan



Dra. Hj. Retnawati Siregar

H. Syahriandi SE, MSi.

## RINGKASAN

**ALI MUSA, Peranan Laporan Keuangan Dalam Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan, Skripsi, 2005.**

Upaya untuk melaksanakan reformasi disegala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan pada Tap MPR RI No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh yang didasarkan kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Selaras dengan tekad tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden) No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan seluruh Pemerintah Eselon II ke atas wajib membuat Laporan Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) kinerjanya kepada Eselon yang di atasnya dan juga kepada publik (masyarakat), termasuk Kepala Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan.

Disamping dilatar belakangi tuntutan aturan hukum, Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur yang tujuan utamanya adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan atas fisi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Delam melaksanakan kinemyanya terutama pelayanan kepada masyarakat antara lain penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

Keterangan Rencana Peruntukan (KRP) penggunaan tanah dan pelayanan lainnya, Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan melaksanakan berbagai bentuk penerimaan dan pengeluaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jenis penerimaan berupa retribusi. Untuk tahun anggaran 2003 penerimaan terealisasi sebesar Rp. 31.748.222.511,00 dari rencana sebesar Rp.31.099.887.000,00 pengeluaran terdiri dari belanja rutin terealisasi Rp.4.136.779.551,00 dari rencana sebesar Rp.4.269.805.010,00 dan belanja modal dengan realisasi Rp.533.594.000,00 dari rencana sebesar Rp. 540.444.000,00

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Gavernance) terutama dalam pengelolaan keuangan Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Pemerintah) memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan petanggungjawaban (Akuntabilitas) keuangan, ditinjau dari sisi internal laporan keuangan merupakan alat pengendalian (pengawasan) keuangan dan evaluasi kinerja dari Kepala Dinas dan Dinas itu sendiri sedangkan dari sisi eksternal laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan dan pengukuran kinerja keuangan meliputi value for money yang lebih dikenal dengan konsep 3E (Ekonomi, Effisiensi dan Effektivitas). Ekonomi dan effisiensi terutama bertujuan untuk menentukan apakah dinas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya (seperti Karyawan, gedung, ruang dan peralatan kantor) secara ekonomis dan effisien serta untuk menemukan sebab terjadinya peraktek-peraktek yang tidak ekonomis atau tidak effisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem infonnasi, prosedur administrasi

dan struktur organisasi. Sedangkan efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan oleh dinas, kesesuaian hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau telah mempertimbangkan hasil yang sama dengan biaya yang lebih rendah.

Sistem kinerja keuangan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu kepala dinas menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial. dengan tujuan memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya pertanggungjawaban terhadap masyarakat, terutama kepada pemberi retribusi atas pelayanan yang diberikan.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah-Nya, hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Peranan Laporan Keuangan Dalam Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan “ guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan.

Skripsi ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk karya ilmiah disebabkan oleh kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Penulis, akan sangat wajar apabila skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan sikap responsip baik dalam bentuk kritik maupun saran demi kesempumaa penulisan Skripsi ini..

Dengan selesainya penulisannya, maka Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. SYAHRIANDI, SE. MSi. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. RASDIANTO MS. selaku Pembimbing I. Dan Ibu Dra. Hj. ROSMAINI, AK. selaku Pembimbing II, yang telah bersedia memberikan bimbingan , arahan serta petunjuk atas penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. ZAINAL ABIDIN DAN Hj. SARIBULAN TAMBUNAN SE. selaku Ketua dan Sekretaris Majelis Penguji dan Pembimbing Skripsi Ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/22

5. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama dalam perkuliahan.
6. Bapak Kepala, dan seluruh staf Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan pengambilan data dan penelitian untuk keperluan penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang tua dan adik-adik tercinta yang telah memberikan dorongan baik dalam masa-masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
8. terutama sekali Kepada Istri dan anak-anak tercinta yang telah memberi kerelaan waktu dan keizinan baik dalam wak menempuh perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.

Akhimya dan dengan penuh pengharapan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya pada diri penulis pribadi,

Terima kasih.....

Medan, JULI 2005.

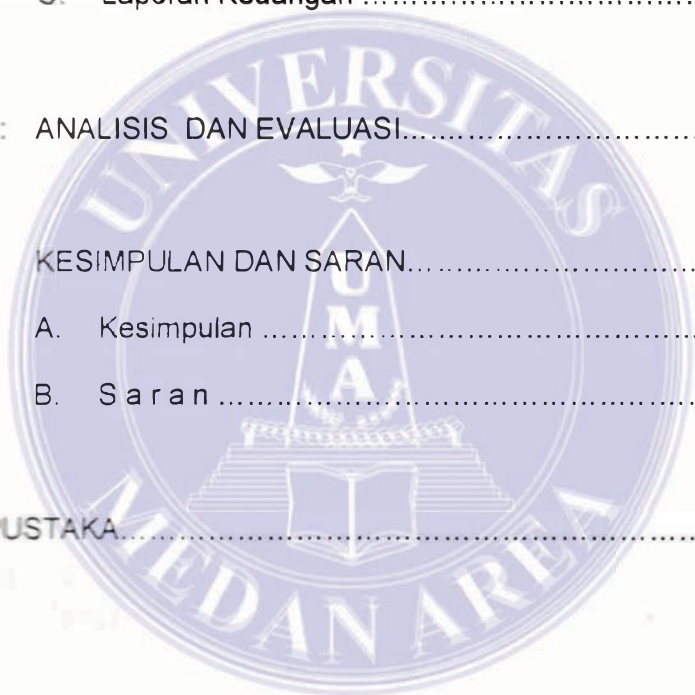
ALIMUSA

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Luas, Tujuan dan Manfa'at Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data ...	5
E. Metode Analisis.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	
A. Pengertian , Tujuan, Jenis dan Pendekatan Anggaran .....	8
B. Pengertian, Tujuan & Fungsi dan Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik .....	12
C. Pengertian, Unsur (Dimensi) dan Jenis Penilaian Akuntabilitas .....	20



BAB III	: DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN	
	KOTA MEDAN .....	
	A. Gambaran Umum .....	29
	B. Rencana Anggaran .....	34
	C. Laporan Keuangan .....	39
BAB IV	: ANALISIS DAN EVALUASI.....	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	
	A. Kesimpulan .....	74
	B. S a r a n .....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		79



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel - 1 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2003.....	36
Tabel - 2 : Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi.....	40
Tabel - 3 : Laporan Penerimaan Gaji dan Penghasilan lainnya.....	41
Tabel - 4 : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Untuk Belanja Rutin .....	43
Tabel - 5 : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Untuk Belanja Modal .....	44
Tabel - 6 : Laporan Surplus - Defisit .....	46
Tabel - 7 : Laporan Perubahan Aktiva .....	47
Tabel - 8 : Laporan Aliran Kas .....	48
Tabel - 9 : Laporan Realisasi Anggaran.....	51
Tabel - 10 : Akuntabilitas Keuangan (Capaian Kinerja Keuangan) T.A. 2003 .....	55
Tabel - 11 : Perkembangan APBD Kota Medan Tahun 2002 dan Tahun 2003 .....	63
Tabel - 12 : Biaya, Target, dan Realisasi Penerimaan Retribusi.....	64
Tabel - 13 : Pendapatan dan Biaya T. A. 2002 dan 2003.....	65
Tabel - 14 : Realisasi dan penyerapan Dana APBD.....	66
Tabel - 15 : Perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR).....	68
Tabel - 16 : Pertumbuhan APBD .....	69
Tabel - 17 : Analisa Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas (Capaian Kinerja Keuangan) .....	70
UNIVERSITAS MEDAN AREA Neraca .....	78

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul.

Reformasi mulai bergulir lebih-kurang 6 (enam) tahun yang lalu tepatnya tahun 1999 yang telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta ini baik yang dirasakan positif maupun negatif dan mengharuskan semua pihak melakukan adjustment (penyesuaian), salah satunya adalah reformasi tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih dikenal dengan "Otonomi Daerah".

Sebagai konsekwensinya, maka hubungan pemerintah pusat dan daerah termasuk di dalamnya hubungan keuangan (reformasi keuangan daerah) menjadi isu yang sangat penting dan mendapat sorotan banyak pihak karena pada dewasa ini penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sering dinilai sebagai sarang in-efficiency, kebocoran dana, dan instansi yang selalu merugi.

Masalah kebocoran dana, ini adalah masalah yang sangat serius di dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Namun masalah ini lebih banyak menyoroti aspek moralnya dan tidak banyak pihak yang menyadari bahwa masalah ini sebagai sebuah persoalan akibat dari kegagalan administrasi yang berkaitan dengan metode pengelolaan, metode pembukuan, dan metode pengawasan keuangan negara itu sendiri.

Akibat dari reformasi keuangan daerah tersebut salah satunya adalah memunculkan Peraturan Pemerintah (PP) No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP ini

merupakan turunan dari Undang Undang (UU) No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan persoalan yang mencuat dari PP ini adalah tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang berkaitan dengan akuntabilitas.

Masalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang berkaitan dengan akuntabilitas tidak akan terpisahkan dengan disiplin akuntansi penyelenggaraan pemerintahan (sektor publik) atau yang lebih dikenal dengan Akuntansi Pemerintahan.

Tugas dan tanggung jawab Akuntansi Sektor Publik atau Akuntansi Pemerintahan ditekankan untuk dapat menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi seperti untuk perencanaan dan pengendalian manajemennya maupun eksternal sebagaimana yang dijelaskan dalam Governmental Accounting Standards Boards (GASB) dalam concept statement NO.1 (par.56) tentang Objectives Of Financial Reporting yang dikutip oleh Mardiasmo, bahwa :

**“Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja dan menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.”<sup>1</sup>**

Maka dalam hal ini Akuntansi Sektor Publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik, juga sejalan dengan pasal 38 PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang

<sup>1</sup> Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Andi, Yogyakarta, 2002, Hal.163.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif. Bachtiar. Muchlis. Dan Iskandar, **Akuntansi Pemerintahan**, Edisi Pertama, PT.Salemba Empat Patria, Jakarta, 2002.
- Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**, PT. Salemba Empat Patria, Jakarta, 2002.
- Elwood Sheila, **Parish and Town Councils : Financial Accountability and Management**, Local Government Studies Vol.9, pp.368-386, 1993.
- Indra Bastian, **Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Joko Widodo, **Good Governance**, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Kusweni Ukar, **Refrensi Praktis Microsoft Word**, PT.Elek Media Computindo, Jakarta, 2001.
- Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Marzuki, **Metodologi Riset**, Cetakan ke 9, Bag. Penerbitan Fak. Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002
- Revrisond Baswir, **Akuntansi Pemerintahan Indonesia** ,Edisi ke 3, Cetakan ke 7, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Syofyan Syafri Harahap, **Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan**, Edisi-I, Cetakan ke 3, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soemarso, **Akuntansi Suatu Pengantar**, PT. Salemba Empat Patria, Jakarta, 2002.
- S. Munawir, **Akuntansi Keuangan dan Manajemen**, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002.
- Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan, **Informasi Tata Ruang Kota Medan & Pelayanan Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan Tahun**, Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan, Medan, 2002.
- Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan Tahun 2002**, Pemerintah Kota Medan, Medan, 2002.

Departemen Dalam negeri RI, **Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelayanan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta, 2002. (Tidak dipublikasikan)

Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan, **Rencana Strategik Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan Tahun 2002-2006**, Pemerintah Kota Medan, Medan, 2002.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, **Undang Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah**, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1999.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, **Undang Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah**, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1999.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, **Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, Badan Penerbit Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003

Pemerintah Kota Medan, **Peraturan Daerah No.4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan**, Pemerintah Kota Medan, Medan, 2001.